

**PRINSIP SYŪRĀ DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS SERTA
PENERAPANNYA DALAM SISTEM NEGARA MODERN
(SUATU ANALISIS SIYĀSAH SYAR'IYAH)**

Ruslan Sangaji

Institut Agama Islam Negeri Bone

ruslanssangaji@gmail.com

Muh. Akbar Amnur

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bone

akbaramnur@gmail.com

Abstract

This study examines the principle of shura and its application within modern state governance systems. Rooted in Islamic Sharia, shura is often compared with modern governance frameworks such as democracy, particularly in countries like Indonesia. To address this, shura is first analyzed through its primary sources—the Qur'an and Hadith—along with scholarly interpretations and understandings. The discussion then contextualizes the principle of shura using the methodology of maqasid al-shari'ah, an effective approach to evaluating shura as a viable solution for national governance. In this context, shura, often represented by the concept of ahl al-hall wal-aqd in al-siyāsah dusturiyah, aligns both in essence and application with consultative institutions within modern systems, such as trias politica. Specifically, the trias politica popularized by Montesquieu divides the functions of the majlis al-shura into three branches: legislative power, executive or administrative power, and judicial power. Ultimately, the paper argues that the universal values of shura remain intact despite transformations in its form, name, and implementing institutions.

Keywords: *Shura; maqasid al-shari'ah; ahl al-hall wal-aqd, democracy.*

Abstrak

Tulisan ini akan mengurai tentang prinsip syūrā dalam al-Qur'an dan Hadis dan penerapannya dalam sistem tata negara modern. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa syūrā berasal dari syariat Islam dan saat ini diperhadapkan dengan sistem tata negara modern seperti demokrasi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, terlebih dahulu syūrā harus dikaji dari sumber asalnya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis hingga pandangan-pandangan para ulama yang menafsirkan dan memaknai syūrā. Kemudian, dari wacana prinsip syūrā dibawa kepada konteks dengan metodologi *maqāsid al-syar'iyah*, cara tersebut sangat efektif untuk menguji status syūrā sebagai prinsip yang diberlakukan dalam sistem demokrasi. Dalam hal ini, syūrā —dalam term *al-siyāsah dustūriyah* biasa dikenal dengan *ahlul hall wal aqd*, telah diakomodir secara makna dan penerapannya dengan lembaga musyawarah dalam sistem negara modern seperti trias politica. Khususnya *trias politica* yang dipopulerkan oleh Montesquieu, membagi fungsi majelis syura kepada tiga cabang; kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif atau administratif, dan kekuasaan yudisial. Pada akhirnya, penulis melihat

nilai universal syûrâ tidak tergeser sekalipun mengalami perubahan bentuk, nama, dan pihak yang melaksanakan lembaga syura tersebut.

Kata Kunci: *Syûrâ, maqâsid al-syar'iyah, ahl al-hall wal-aqd, demokrasi.*

PENDAHULUAN

Kajian prinsip syûrâ dalam berbagai literatur kerap kali disandingkan dengan sistem demokrasi yang selama ini sedang berkembang. Fenomena itu muncul khususnya di dalam negara yang mengadopsi sistem demokrasi, tak terkecuali negara yang berpenduduk mayoritas muslim saat ini. Walhasil, ternyata terjadi pro-kontra tentang pemaknaan syûrâ dan penerapannya, akhirnya tak dapat dihindarkan. Berdasarkan kondisi tersebut, tak heran apabila kalau di satu sisi terdapat satu pandangan yang menganggap syûrâ adalah demokrasi itu sendiri,¹ sementara di sisi lain, justru menganggap syûrâ dan demokrasi merupakan dua hal berbeda.² Namun, diantara kedua pandangan tersebut terdapat pula pandangan lain yang melihat bahwa syûrâ sebatas bagian dari organ dan fungsi kekuasaan negara, baik yang menganut sistem demokrasi maupun selainnya.

Terlepas dari berbagai kontradiksi baik dari segi makna dan terapan, pada hakikatnya syûrâ bersumber dari Hukum Islam. Oleh karena itu, syura tidak bisa dipisahkan dari sumbernya tersebut, kendati kemudian mengalami perkembangan seiring kemajuan zaman. Terlebih pada masa keemasan kekhalifan Islam yang mulai membentuk lembaga khusus syura ditandai dengan istilah *ahl hall wal aqd* yang masyhur dalam terminologi *al-al-siyâsah al-syar'iyah* hingga pada akhirnya membaaur dengan teori modern pada era *nation-state* dewasa ini.

Pertemuan antara syûrâ dan teori-teori modern itulah kemudian memunculkan kajian-kajian yang baru yang butuh kepada verifikasi dan tinjauan keilmuan yang serius. Sejauh ini tulisan mengenai syura telah banyak dilakukan,³ namun, masih perlu dikemukakan prinsip syura dari sudut pandang *al-siyâsah al-syar'iyah*. Untuk itu penelitian ini meninjau prinsip syura lewat analisis *maqâsid al-syar'iyah*. Tulisan ini merupakan kajian Pustaka yang melibatkan sejumlah referensi yang merupakan sumber data mulai dari pengertian dasar syûrâ hingga penafsiran ulama. Kemudian masuk ke

¹Lihat Ahmad Al-Mouşalli, *Jadaliyyât al-Syûra wa al-Dimuqrâtiyyah*. (Beirut: Markaz al-Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah, 2007)

²Lihat Abdullâh bin 'Abdul 'Aziz Al-'Anqârî, *Al-Syûra wa al-Dimuqrâtiyyah Haqîqatuhuma wa 'Ahammu al-Furûqi Baînahumâ*, (Riyadh: Al-Jamiah al-Mulk al-Suud, 2016.)

³ Lihat; (1) Firmansyah, Windi Riyani, Nyimas Lidya Putri, "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 03, No. 1, Januari-Juni 2023.

(2) Srimadona, Sulastrî Caniago, "Titik Temu Antara Voting dan Syura Dalam Pemilihan Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2022.

(3) Kun Budianto, "Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syura'," *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Vol. 1 No. 2, Desember 2017.

dalam ruang lingkup yang berhubungan dengan kedudukan lembaga majlis syura dan fungsinya bagi kemaslahatan umat sebagaimana yang akan dibahas dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Syûrā serta Kandungan Maknanya dalam Kitab Tafsir dan Hadis

Kata syûrā bersumber dari *nuṣūṣ al-syari'ah* (al-Qur'an dan Hadis), seiring waktu mengalami perkembangan sesuai kondisi penerapannya. Imam al-Thabrisi, salah satu ulama yang hidup pada era Dinasti Abbasiyah, ketika memaknai syûrā berkata sebagai berikut:

المُفَاوِضَةُ فِي الْكَلَامِ لِتُظْهِرَ الْحَقَّ

Artinya:

“saling bertukar pikiran mengenai sebuah pembicaraan untuk menampakkan kebenaran”⁴

Namun, sebelum lebih jauh mengenal tafsir dan makna syura dari sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan Hadis, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan term tersebut dari sisi etimologis maupun terminologis. Sekaligus transformasi makna dan bentuk penerepannya sebagai pilar dan organ kekuasaan di dalam suatu negara yang mengadopsi prinsip syura.

a. Definisi Syura: Dari Makna Asal hingga Terminologi Modern

Lafaz “syûrā” (شورى) berakar dari kata *syawara* (شور) yang terdiri dari huruf *syin*, *wau*, dan *ra* memiliki dua makna pokok (*musytarak*) dan berlaku secara konstan. Makna pertama adalah memulai sesuatu, menampakkan dan menawarkannya, adapun yang kedua, *syawara* bermakna mengambil sesuatu. Untuk makna pertama, para ahli bahasa menggunakannya dalam ungkapan, misal:

شِرْتُ الدَّابَّةَ سُورًا إِذَا عَرَضْتُهَا. وَالْمَكَانُ الَّذِي يُعْرَضُ فِيهِ الدَّوَابُّ هُوَ الْمِشْوَارُ

Artinya:

“saya memamerkan binatang ternak sebagai tawaran ketika saya menawarkannya (binatang ternak itu). Dan tempat penawaran binatang ternak adalah misywar (batas berlari binatang ternak tatkala dijual).”⁵

Sementara makna untuk yang kedua seperti perkataan orang Arab:

شِرْتُ الْعَسَلَ أَشُوْرَهُ وَقَدْ أَجَارَ نَاسٌ أَشْرَتُ الْعَسَلِ

⁴Wahbah Al-Zuhāyilī, *Al-Syūra fī al-Islām: Al-Syūra fī al-'Ushūri al-'Abbāsi Fikran wa Mumārasatan*. (Juz I; Oman: MAAB: Muassasah Ali Al-Bait, 1989). h. 390

⁵Abu Husain Ahmad Ibnu Faris Ibnu Zakariyah, *Mu'jam Maqāyiz al-Lughah* (Juz 3; Kairo: Darul Fikri, 1979) h. 226.

Artinya:

“saya mengambil madu benar-benar mengambilnya dan sekelompok orang (ahli bahasa) membolehkan (penggunaan kata) *asyartu*—saya mengeluarkan /memeras madu.”⁶

Adapun derivasi kata *syûrā* yang mengalami penambahan struktur (*binā*) seperti *al-musyāwarah* (المشاوره), *at-tasyāwur* (التشاور), dan *al-masyûrah* (المشورة) berarti “berusaha mengeluarkan pandangan (kesepakatan) melalui tinjauan dari setiap orang.” Sebuah ungkapan yang diambil dari ucapan orang Arab شِرْثُ الْعَسَلِ yakni ketika saya mengambil madu dari tempatnya serta mengeluarkannya.⁷

Saad ‘Abdul Salām memaknai syura secara deskriptif yang terikat dengan konteks sekarang ini, yaitu “salah satu asas perundang-undangan yang paling penting yang dijalankan oleh sistem pemerintahan di dalam Islam. Sistem pemerintahan dalam Islam yang pantas dan layak yang dilegitimasi oleh Islam eksistensinya dibangun lewat prinsip syura. Maka pengelolaan urusan dan pengambilan keputusan wajib dijalankan melalui diskusi dan saling bertukar pikiran.”⁸

Hal senada pun dilalukan Ahmad Al-Mouṣalli atas pembacaannya terhadap kedaulatan negara menurut Al-Māwardī, bahwa “negara berdaulat harus didirikan di atas sistem syura yang benar, atau dalam bahasa modern, pemerintahan dari rakyat yang dijalankan dengan bentuk demokrasi (syura).”⁹ Sedangkan Syekh Muhammad Abu Zahra meletakkan syura dalam definisi yang lebih luas, dia memandang bahwa al-Qur’an menjadikan syura “sebagai landasan hukum yang umum, karena setiap urusan kaum muslim dalam hal yang belum diatur oleh nas, maka syura adalah landasan hukum bagi hakim (pemberi keputusan).”¹⁰

Kemudian, kata syura dan musyawarah yang berasal dari Bahasa Arab diserap ke dalam Bahasa Indonesia, yang *pertama*; syura berarti nasihat.¹¹ *Kedua*, musyawarah, berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan.¹² Kedua istilah inilah yang sering dibarengkan dengan kata forum, dewan, atau majelis seperti forum permusyawaratan, dewan syura, atau majelis permusyawaratan yang ada di dalam organ kekuasaan pemerintah.

b. Syûrā dalam Perspektif Ahli Tafsir

Sebagaimana telah disinggung pada pendahuluan tulisan ini bahwa di dalam al-Qur’an terdapat tiga redaksi ayat berbicara secara gamblang mengenai syûrā. Adapun ketiga ayat tersebut sebagai berikut:

⁶Abu Husain Ahmad Ibnu Faris Ibnu Zakariyah, *Mu’jam Maqāyiz al-Lughah*, h.226.

⁷ Al-Rāgib Al-Asfahāni, *Al-Mufradāt Fī Gharīb al-Qur’ān*. (Beirut: Darul Ma’rifah) h.270.

⁸Saad Abdul Salām Habīb, *Al-Syûra fī al-Islam* (Kairo: Al-Majlis al-A’lā li al-Syuûn al-Islāmiyah, 1976) h.9.

⁹ Ahmad Al-Mouṣalli, *Jadaliyyāt as-Syûra wal Dimuqrātiyyah*, h. 35.

¹⁰ Saad Abdul Salām Habīb, *Al-Syûra fī al-Islam*, h. 26

¹¹ “syura”. KBBI Daring, 2016. Web. 26 Sep 2024.

¹² “musyawarah”. KBBI Daring, 2016. Web. 26 Sep 2024.

1) Syura dalam QS Al-Baqarah/1: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan¹³.

Tiga duduk perkara yang disorot oleh Syaikh Ahmad Mustafā Al-Marāghī ketika menjelaskan makna potongan ayat “*fain arāda fiṣālan ‘an tarāḍin minhumā watasīyāwurin falā junāha ‘alāihimā*” di atas. *Pertama*, kedua orang tua punya hak yang sama atas hak asuh anak. *Kedua*, pola pengasuhan orang tua sebaiknya dengan didikan yang benar, seimbang antara jiwa dan raga anak sejak balita. *Ketiga*, penyapihan anak harus dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak secara sukarela. Apakah penyapihan kurang atau lebih dua tahun dengan mempertimbangkan sisi baik buruknya terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.¹⁴

Pentingnya musyawarah bisa dilihat dari petunjuk ayat tersebut, bahkan dalam lingkup yang sederhana seperti mendidik anak. Terlebih pada wilayah yang jauh lebih luas, terkait dengan mendidik dan mengatur urusan umat.¹⁵

2) Syura dalam QS. Ali Imran /3: 158

فَمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (158)

Terjemahnya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah

¹³Terjemahan Kemenag 2019

¹⁴ Ahmad Mustafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, (Cet.I; Kairo: Mustafa Al-Halabi, 1945) h.188

¹⁵ Ahmad Mustafā Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, h.188.

*mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.*¹⁶

Sebab turunnya ayat di atas berdasar pada kekalahan saat Perang Uhud. Nabi Muhammad saw. beserta kaum muslim mengalami kekalahan akan tetapi dalam kondisi yang pelik itu, ayat tersebut turun untuk menenangkan Nabi beserta kaum muslim. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. melakukan musyawarah dengan tutur kata yang lemah lembut dan halus.¹⁷

Lebih lanjut Prof. Muh. Quraish Shihab mendedah makna *wasyāwirhum*, kata *syāwara*, pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Lalu berkembang hingga meliputi segala sesuatu yang dapat diambil/dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah, pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal baik, sejalan dengan makna dasar di atas.¹⁸

Dibanding dengan dua ayat lainnya yang membicarakan musyawarah, ayat di atas justru menggunakan redaksi kata *wasyāwirhum* berupa *fiil amr* (perintah). Kata *syāwir* adalah kata kerja bentuk perintah yang berarti “*bermusyawarahlah.*” Apabila ditinjau dari sisi semiotika, hal itu menunjukkan kepada *amr/perintah* dalam makna majaz yang bermakna *al-fi’lu al-laẓī ta’zimu alāih* (perbuatan yang hendak kamu lakukan).¹⁹

Sedangkan perintah menurut *kaidah ushuliyyah* adalah:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya:

Hukum asal di dalam perintah menunjukkan wajib.

Dengan kata lain, perintah musyawarah itu adalah wajib sebelum hendak melakukan perbuatan tersebut. Kewajiban melaksanakan syura itu diperkuat dengan penjelasan yang lain baik lewat redaksi dan konteks ayat, matan dan makna hadis, atau *atsar* dan riwayat dari para sahabat.

Lewat ayat itu pula, Prof. Muh. Quraish Shihab juga menyingkap setidaknya lima unsur penting sebelum melakukan musyawarah. *Pertama*, berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. *Kedua*, memberi maaf dan membuka lembaran baru.

¹⁶ Terjemahan Kemenag 2019

¹⁷ Muh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Vol.II; Bekasi: Lentera Hati, 2001) h. 258.

¹⁸ Muh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, h. 258

¹⁹ Abū Zakariyah Al-Anṣarī, *Ghāyatul Wushūl Syarh Lubb al-’Ushūl*. (Cet. II; Indonesia, Al Haramain, 2016). h.71.

Ketiga, Kecerahan pikiran dibarengi ketajaman analisis. *Keempat*, Permohonan magfirah serta ampunan Ilahi. Dan, *Kelima*, Kebulatan Tekad.²⁰

3) Syura dalam QS As-Syura/42: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ (38)

Terjemahnya:

*Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.*²¹

Penamaan “*al-syūra*” sebagai salah satu surah di dalam al-Qur’an menunjukkan kedudukannya yang mulia di dalam Islam. Oleh karena itu, salah satu aspek yang penting dari ayat di atas menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhāyī adalah *al-akhdzu binizami al-syar’i*—penerapan sistem syura.

Maksud dari “*wa’ amruhum syūra baīnahum*” menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhāyī bahwa mereka (para sahabat) bermusyawarah dalam setiap urusan yang khusus dan umum. Dan tidak mengisolasi diri untuk berpendapat mengenai persoalan yang umum, seperti pengangkatan khalifah dan urusan penataan dan perencanaan negara demi kemaslahatannya.²²

Kata *amr* pada ayat *wa’ amruhum syūra baīnahum* bisa dikompromikan dengan *al-amr* di dalam “*wasyāwirhum fil amr.*” Ketika perhatian diarahkan kepada *al-amr*, maka kata itu menunjukkan lafaz ‘*am* (umum) yang komprehensif terhadap seluruh motif perkara, cakupan, dan coraknya. Kedua ayat tersebut menjadikan objek kajian syura lebih umum dan holistik meliputi seluruh perkara yang penting bagi kaum muslim.²³ Sesuai dengan kaidah ilmu tafsir:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya:

Pertimbangan hukum adalah dengan keumuman lafaz bukan dengan kekhususan sebab turunnya ayat.

Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah karena Nabi Muhammad saw., adalah orang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dan mereka pun menempuh cara dan metode yang sama dalam perkara-perkara yang penting, seperti

²⁰ Muh. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, h.159-160.

²¹Terjemahan Kemenag 2019

²² Wahbah al-Zuhāyī, *Al-Tafsir Al-Munīr fil Aqīdati wa al-Syar’i ati wa al-Manhaj*, (Juz 25; Beirut: Darul Fikri Al-Muashir, 1991) h.81-82

²³ Shalāh ‘Abdul Fattāh Al-Khālidī, *Al-Syūra fil Qur’ānil Karīm*, (Juz I; Oman: Muassasah Ali Al-Bait MAAB, 1989) h.62.

mengangkat khalifah, memerangi kaum murtad, dan melakukan istinbat untuk persoalan dan kejadian yang terbaru.²⁴

c. Syura dalam Hadis Nabi

Sebagai sumber kedua dalam Hukum Islam, hadis juga memuat tentang syura/musyawahah baik itu secara redaksional maupun kontekstual. Di antara hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Hadis Riwayat Baīhaqī

قال أبو هريرة رضى الله عنه : ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya:

Abū Hurāirah mengatakan: Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabatnya kecuali Nabi.

2) Hadis Riwayat Ṭabrāni

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أمرا فشاور فيه امرا مسلما وفقه الله لأرشد أموره

Artinya:

Ibnu ‘Abbās mengatakan: Nabi bersabda: Barangsiapa yang ingin sesuatu lalu ia musyawarahkan dengan seorang Muslim maka Allah akan memberikan petunjuk/menjadikan urusannya lebih baik.

3) Hadis Riwayat ‘Alauddīn bin Hisām

حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثني ابن غنم أن رسول الله، ﷺ، لما خرج إلى بني قُرَيْظَةَ والنضير، قال له أبو بكر وعمر: «يا رسول الله، إنَّ الناس يزيدهم حرصًا على الإسلام أن يَرَوْا عليك زِيًّا حسنًا من الدنيا، فانظر إلى الحلة التي أهداها لك سعد بن عبادَةَ فألبسها فليركَّ اليوم المشركون أنَّ عليك زِيًّا حسنًا.» قال: «أفعل وايم الله، لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدًا.»

Artinya:

Dari Abdurrahman bin Ganam, bahwasanya Nabi ketika keluar menuju Bani Quraizah, Abu Bakar dan Umar mengatakan kepadanya: wahai baginda Nabi sesungguhnya orang-orang bertambah semangat terhadap Islam ketika melihat engkau berpakaian dengan baik, maka lihatlah pakaian yang telah dihadiahkan Saad bin Ubadah kepadamu, dan pakailah sehingga orang-orang Musyrik melihat hari ini dengan pakaian yang baik. Nabi mengatakan: Aku akan melakukannya demi Allah. Seandainya engkau berdua sepakat untukku maka aku tidak akan menyalahi hasil musyawarahmu.

²⁴ Wahbah al-Zuhāyilī, *Al-Tafsir Al-Munīr fil ‘Aqīdati wa al-Syari‘ati wa al-Manhaj*. h.81-82.

Musyawarah adalah prinsip dasar yang solutif untuk mengatasi persoalan personal terlebih masalah komunal, karena di dalam syura terdapat kebaikan.²⁵ Mengutip ‘Abdul Wahāb Khallāf, Lukman Arake ketika mengomentari hadis-hadis tersebut di atas mengatakan bahwa terabaikannya musyawarah di tengah-tengah masyarakat muslim dengan klaim syura bertentangan dengan konstitusi menjadi faktor utama penyimpangan dalam sejarah pemerintahan umat islam. Karena pengabaian itu telah mematahkan salah satu sendi prinsip islam yang seharusnya dirawat dan dijaga oleh mereka sendiri.²⁶

Definisi, tafsir, dan makna hadis yang telah dijelaskan sebelumnya tampak bahwa prinsip syura adalah perintah syariat yang tak boleh ditentang. Hanya saja syariat tidak membatasi metode tertentu bagi syura, akan tetapi menyerahkannya kepada orang-orang sesuai percobaan dan pengetahuan mereka terhadap persoalan kehidupan.²⁷ Maka pemaknaan terhadap prinsip syura selalu terbuka dan menerima penyesuaian terhadap keadaan suatu masyarakat yang menerapkan prinsip tersebut dalam bentuk lembaga atau tidak.

2. Kontektualisasi Prinsip Syura Tinjauan Analisis *Al-siyāsah al-Syar’iyah*

Pasal sebelumnya pembahasan berfokus kepada kajian tekstual (*nusūs*) maka di sini, kajian akan terpusat pada makna kontekstual (*maqāṣid*) atas prinsip syura. Karena *maqāṣid al-syar’iyah* merupakan salah satu rambu-rambu *al-siyāsah al-syar’iyah*, selain *dalil-dalil kully* (dalil universal), semangat ajaran, dan *qawāid kulliyah fiqhiyah* (kaidah-kaidah universal *fiqhiyah*), untuk mengendalikan dan mengarahkan kehidupan umat.²⁸

Dr. Muhammad al-Yubi memaknai *maqāṣid al-syar’iyah* sebagai berikut:

المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد.

Artinya:

Makna dan hikmah dan sejenisnya yang dijaga oleh *syāri’* (pemilik syariat) dalam pensyariaan baik secara umum dan khusus demi merealisasikan kemaslahatan umat manusia.²⁹

Atas dasar tersebut Imam al-Haramānī al-Juwaīnī merumuskan ungkapan yang merangkum cakupan *maqāṣid al-syar’iyah*, yaitu الأغراض الدفعية النفعية / *tujuan pencegahan dan kemanfaatan*. Yang berarti *maqāṣid al-syar’iyah* memiliki dua dimensi yaitu mencegah kemudaratan dan menarik kemanfaatan yang kemudian lebih populer

²⁵ Lukman Arake, *Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan* (Cet I; Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020) h.142.

²⁶ Lukman Arake, *Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan*, h.142.

²⁷ Saad ‘Abdul Salām Habīb, *Al-Syūra fi al-Islam*, h.40.

²⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Al-siyāsah Implementasi Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada, 2003) h.29.

²⁹ Ali Jum’ah, *Tarīb al-Maqāṣid al-Syar’iyah* (Al-Mu’tamar al-Tsāni wa al-Isyrūn; Al-Majlis A’la li al-Syuūn al-Islamiyah) 2010, h.4.

diungkapkan dengan *جلب المصالح ودرء المفاسد* menarik masalahat dan mencegah mafsadah.³⁰

Sehingga dalam kajian ini dikenal istilah *uṣul al-maṣhālih* (pokok-pokok kemaslahatan) yang harus dijaga: (i) *Al-ḍarūriyat* (primer), (ii) *Al-hājiyat* (sekunder), dan (iii) *Al-tahsīniyat* (tersier). Sementara syura masuk dalam kategori pertama, yaitu *al-ḍarūriyat*. Para ulama—bahkan seluruh agama-agama—sepakat bahwa syariat diletakkan untuk menjaga *al-ḍarūriyat al-khamsah* (lima asas universal); yaitu; *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-māl* (harta), dan *al-‘aql* (harta).³¹ Sementara Al-Ghazālī, Al-Rāzī, Al-Subkī, dan Al-Isnāwī mendefinisikan *al-ḍarūriyat* dengan makna; “kemaslahatan yang berwujud menjaga tujuan dari *al-ḍarūriyat al-khamsah* (lima asas universal).”³²

Maka kewajiban syura sangat ditekankan sebelum mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan. Terutama dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berorientasi kepada kemaslahatan umum. Kondisi tersebut sejalan dengan kaidah *muqadimmah al-wujūb* (pengantar kewajiban):

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya:

sesuatu yang tidak membuat yang wajib sempurna kecuali dengan adanya (sesuatu itu) maka ia wajib.

Sampai di sini bisa ditarik sebuah benang merah bahwa titik persoalan yang muncul adalah perkara *ijtihādiyyah*. Maksud dari perkara *ijtihādiyyah* adalah persoalan yang tidak terikat oleh sebuah nas sehingga butuh kepada analisis dan istinbat hukum. Hal itu berkutat seputar bentuk pelembagaan, mekanisme pelaksanaan, begitu pula para ahli yang berwenang menjalankan syura khususnya dalam negara modern.

Umpama metode syura dijalankan oleh suatu kelompok, komunitas atau negara tertentu berbeda dengan yang lain, juga terikat oleh *‘urf* (hukum kebiasaan) masing-masing. Dalam ini berlaku kaidah:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان

Artinya:

Tidak dapat diinkari perubahan hukum terjadi sebab perubahan zaman.

³⁰ Afifuddin Muhajir, *Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Timbangan Syariat (Kajian Pancasila dari Aspek Nushsus dan Maqashid)* 2024, h.16.

³¹ Abū Ishaq al-Syāṭibi, *Kitab Al-Muwāfaqāt* (Jil. II;Fes:Al-Basyir Benatia, 2017) h.50.

³² Ali Jum‘ah, *Tartīb al-Maqāsid al-Sya‘iyah*, h.6

Kaidah ini berbicara tentang hukum *ijtihādiyyah*. Mengalami perubahan sebab berubahnya orientasi, kondisi, dan zaman. Apabila sekelompok orang memiliki ‘urf dan ‘adah yang menetapkan sebuah hukum, kemudian berubah kepada ‘urf dan ‘adah yang lain maka hal itu sangat berdampak dalam perubahan hukum. Namun, yang berubah adalah metode penerapan sesuai tuntutan hukum ketika terjadi perbedaan orientasi, kondisi, dan waktu. Adapun nas selalu tetap dan tidak mengalami perubahan.³³

Oleh karena itu, pelembagaan syura khususnya yang berfungsi mengatur dan menjalankan *public policy* (kebijakan publik) dan *public interest* (kepentingan publik) wajib diadakan. Meskipun bisa saja mengalami perubahan sesuai tuntutan zaman dan keadaan yang mengikat. Sebagai *i’tibar al-maṣālih*, mempertimbangkan kemaslahatan demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil dan kondusif.

3. Prinsip Syura di dalam Organ dan Fungsi Kekuasaan Negara

Ada beberapa aspek yang membedakan antara syura dan demokrasi. Syura di dalam sistem syariat islam bersumber dari nas al-Qur’an dan hadis. Sedangkan sistem demokrasi lahir dari tradisi politik Yunani kuno, dengan corak dan karakteristiknya sendiri. Perbandingan dari aspek lain bisa dilihat dari sisi asal katanya, syura berarti mengambil sesuatu yang baik, sedangkan demokrasi berasal dari dua kata, *demos* dan *kratos* yang biasa dimaknai kedaulatan rakyat.

Secara spesifik Prof. Dr. Saīd Ramaḍan al-Būṭi melihat perbedaan tersebut lewat mekanisme pelaksanaan syura di dalam Hukum Islam dan demokrasi. Hukum Islam memerintahkan hakim untuk melaksanakan musyawarah lantaran di dalam sebuah masalah tidak terdapat nas yang tegas atau hukumnya tidak jelas. Untuk merealisasikan wajibnya kerjasama antara para ahli fikih dan *ūlil hal wal ‘aqd*, sebagai upaya untuk mengetahui hukum Allah dan menunaikan perbuatan yang diperintahkan atas hamba-hamba-Nya dalam masalah tersebut.³⁴

Terkait mengenai siapa itu *ūlil hall wal ‘aqd*—atau yang populer dalam *siyasāh dusturiyah*; *ahlul hall wal ‘aqd*, Lukman Arake mengutip Muhammad Abū Zahrah, bahwa yang pantas dianggap sebagai *ahlul hall wal ‘aqd* adalah dapat dilakukan dengan cara memilih orang-orang terbaik dari setiap daerah. Termasuk di dalamnya adalah para ulama, para ahli dan sarjana dari pelbagai latar belakang keilmuan, baik politik, ekonomi, maupun budaya.³⁵ Sebenarnya, keterangan yang disampaikan oleh Lukman Arake, jauh sebelumnya juga telah disampaikan lebih detail oleh Rasyid Ridla seperti yang dikutip oleh Djazuli:

“demikianlah, di kalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta

³³ Abdul Azīz Muhammad ‘Azzām, *Al-Qawāid al-Fiqhiyah*, (Kairo: Darul Hadis, 2005) h.198

³⁴ Saīd Ramaḍan al-Būṭi, *Al-Syūra fi Ahdi al-Khulafāi al-Rāsyidīn* (Juz I; Oman: Muassasah Ali Al-Bait MAAB, 1989) h.145.

³⁵ Lukman Arake, “Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Al-siyasāh,” *Jurnal Ahkam*, Vol.15, No.1, Januari 2015. h.51.

*mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-masalah kemasyarakatan dan politik. Itulah yang disebut dengan ahlu al-syura atau ahl al-hall wa a- 'aqd di dalam islam.*³⁶

Sementara di dalam sistem demokrasi mengharuskan kepala negara berkonsultasi dengan “Majelis Syura” sebagai lidah rakyat dan umat (corong aspirasi) mengingat bahwa rakyat dalam pandangan demokrasi adalah pemilik kekuasaan dan otoritas tanpa pihak yang lain. Untuk menyuarkan hukum dan keputusan rakyat yang disidangkan oleh seluruh atau mayoritas anggota majelis tersebut.³⁷

Pandangan Prof. Dr. Saïd Ramađan al-Būti tampak tidak mempersoalkan sistem yang dianut oleh suatu negara seperti demokrasi. Sekalipun menerapkan teori *separation of power* (pemisahan kekuasaan) atau *division of power* (pembagian kekuasaan) atas tafsir *trias politica* yang dicetuskan Montesquieu, membagi fungsi kekuasaan kepada tiga cabang: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif atau administratif, dan kekuasaan yudisial.³⁸

Dalam konteks ke-Indonesia-an sistem *ahlul hall wal 'aqd* yang disebutkan sebelumnya memiliki kemiripan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) berdasarkan UUD 1945 sebelum mengalami perubahan. Sebab diwakili tiga perwakilan; perwakilan politik, fungsional, dan teritorial. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan menentukan:

“MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Pascaperubahan UUD 1945 keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan sistem *checks and balances*.³⁹ Sekarang setelah Perubahan Keempat UUD, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

*“MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”*⁴⁰

Melihat empat fungsi (i) legislasi, (ii) *control*, (iii) representasi, dan (iv) deliberatif dan resolusi konflik dalam teori negara modern hal itu selaras dengan pandangan ulama mengenai fungsi *ahl hall wal 'aqd* (sistem Hukum Islam) sebagai berikut:⁴¹

1. Memiliki wewenang untuk memilih dan membat/mengukuhkan pemimpin.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.

³⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Al-siyasāh Implementasi Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, h.76.

³⁷ Saïd Ramađan al-Būti, *Al-Syura fi Ahdi al-Khulafai al-Rasyidin*, h.145.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Cet XI; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019) h.282.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, h.292

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, h.308.

⁴¹ H.A Djazuli, *Fiqh Al-siyasāh Implementasi Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, h. 76

3. Membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan Hadis.
4. Tempat konsultasi pemimpin dalam menentukan kebijakannya.
5. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Kendati sewaktu-waktu bisa saja mengalami perubahan akan tetapi tujuan dan fungsinya tetap berada dalam ruang lingkup salah satu *maqāṣid* yang menjadi landasan dalam *al-siyasāh al-syar'iyah* yaitu *hifdh al-ummah* (menjaga umat). Dalam hal ini, paling utama adalah memelihara kesatuan dan kestabilan negara dalam segala bidang.⁴²

SIMPULAN

Syûrā yang selama ini diidentikkan dengan demokrasi merupakan prinsip Islam yang bersifat global. Sumbernya jelas berasal dari referensi primer hukum Islam, al-Qur'an dan Hadis. Tak ada pertentangan pendapat mengenai kedudukannya di dalam hukum Islam, bahkan melalaikan syura berarti telah mematahkan salah satu sendi utama syariat Islam. Orientasi penerapannya pun sangat terang benderang, demi kemaslahatan dan kebaikan dunia dan akhirat. Menjaga eksistensi syûrā berarti telah merawat kehidupan umat, dengan segala persoalan dan problematika yang dihadapinya dewasa ini.

Sementara dalam timbangan *maqāṣid al-syar'iyah*, syûrā termasuk dalam hal yang krusial dan penting keberadaannya, utamanya dalam sistem bernegara sebagai pendahuluan kewajiban. Hal itu dikarenakan hasil dari sebuah musyawarah akan berdampak kepada masyarakat luas. Keputusan yang dihasilkan dalam syura akan berpengaruh kepada seluruh tatanan masyarakat, yang senantiasa mengharapkan kehidupan yang stabil dan kondusif dalam lindungan dan rahmat Allah yang Maha Kuasa.

Tulisan tentang prinsip syûrā lewat analisis *maqāṣid al-syar'iyah* dalam tulisan ini berimplikasi kepada dua sisi; pertama, kajian lebih fokus dan terpusat. Kedua; agar supaya penelitian-penelitian berikutnya yang akan mengkaji prinsip syura tetap terbuka dari aspek yang lain. Demi tercapainya pemerintahan yang baik di bawah kendali sistem yang stabil dan kondusif dengan memanfaatkan prinsip syûrā sesuai fungsi dan tujuannya. Sebagai perwakilan yang memperjuangkan hak-hak rakyat, tanpa mementingkan kelompok sektarian demi kemaslahatan umat.

⁴² H.A Djazuli, *Fiqh Al-siyasāh Implementasi Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, h. 257.

REFERENSI

Al-Qur'an

Al-Anṣarī, Abū Zakariyah. *Ghāyatul Wushūl Syarh Lubb al-'Ushūl*. Cet. II; Indonesia, Al-Haramain, 2016.

Al-'Anqārī, Abdullāh bin 'Abdul 'Aziz. *Al-Syūra wa al-Dimuqrātiyah Haqīqatuhuma wa 'Ahammu al-Furūqi Baīnahumā*, Riyadh: Al-Jamiah al-Mulk al-Suud, 2016.

Al-Asfhahāni, Al-Rāgib. *Al-Mufradāt Fī Gharīb al-Qur'ān*. Beirut: Darul Ma'rifah.

Al-Būṭi, Sa'īd Ramaḍan. *Al-Syūra fī 'Ahdī al-Khulafāi al-Rāsyidīn*. Juz I; Oman: Muassasah Ali Al-Bait MAAB, 1989.

Al-Khālidī, Shalāh 'Abdul Fattāh, *Al-Syūra fil Qur'ānil Karīm*. Juz I; Oman: Muassasah Ali Al-Bait MAAB, 1989.

Al-Marāghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Marāghi*. Cet.I; Kairo: Mustafa Al-Halabi, 1945.

Al-Mouṣalli, Ahmad. *Jadaliyyāt as-Syūra wal Dimuqrātiyyah*. Beirut: Markaz al-Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah, 2007.

Al-Zuhāyli, Wahbah, *Al-Syūra fī al-Islam: Al-Syūra fī al-'Ushūri al-'Abbāsi Fikran wa Mumārasatan*. Oman: MAAB: Muassasah Ali Al-Bait, 1989.

Al-Zuhāyli, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munīr fil Aqīdati wa al-Syarī'ati wa al-Manhaj*. Juz 25; Beirut: Darul Fikri Al-Muashir, 1991.

Arake, Lukman. *Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Al-siyasāh. Jurnal Ahkam*. Vol. 15. No.1, Januari 2015.

Arake, Lukman. *Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan*. Cet I; Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet XI; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019.

'Azzām, 'Abdul Aziz Muhammad. *Al-Qawāid al-Fiqhiyah*. Kairo: Darul Hadis, 2005.

Djazuli, H.A. *Fiqh Al-siyasāh Implementasi Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada, 2003.

Habīb, Saad 'Abdul Salām, *Al-Syūra fī al-Islam*. Kairo: Al-Majlis al-A'lā li al-Syuūn al-Islamiyah, 1976.

<http://KBBI Daring>

Jum'ah, 'Ali. *Tartīb maqāṣid al-Syar'iyah. Al-Mu'tamar al-Tsāni wa al-'Isyrūn*; Al-Majlis A'la li al-Syuun al-Islamiyah, 2010.

Muhajir, Afifuddin. *Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Timbangan Syariat (Kajian Pancasila dari Aspek Nushsus dan Maqashid)*. 2024.

Al-Syātibi, Abū Ishāq, *Kitab Al-Muwafaqāt*. Jil. II; Fes: Al-Basyir Benatiah, 2017.

Shihab, Muh. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol.II; Bekasi: Lentera Hati, 2001.

Zakariyah, Abū Husaīn Ahmad Ibnu Fāris, *Mu'jām Maqāyiz al-Lughah*. Juz 3; Kairo: Darul Fikri, 1979.